
Demokrasi Politik dalam Perspektif Pentakostalisme dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia

Yosua Feliciano Camerling

Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray

Correspondence: yosuacamerling@gmail.com

Abstract

This paper aims to analyze the concept of political democracy in the perspective of Pentecostalism and its application to democratic life in Indonesia. To answer the main problem of this research, the author uses a qualitative research method with data collection techniques through literature studies, namely books, journals and various articles both in print media and online media that are related to the topic of political democracy in the perspective of Pentecostalism and its essence towards democratic life in Indonesia. The results of this study indicate that although the Bible is not explained literally, democratic values are still discussed in it. This means that Christians, including Pentecostals, need to realize the importance of their understanding of political democracy in Indonesia. The impact on democratic life in Indonesia is that Pentecostals should provide support for political democracy, as well as take part in community activities and be actively involved in social services. Thus, the church can carry out its function as an extension of God's hand in the world by creating peace and social justice.

Keywords: democracy; politics; pentecostalism; Indonesia

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep demokrasi politik dalam perspektif pentakostalisme dan implikasinya terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Untuk menjawab pokok masalah penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kajian kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal-jurnal serta berbagai artikel baik di media cetak maupun di media online yang memiliki kaitan dengan topik demokrasi politik dalam perspektif pentakostalisme dan implikasinya terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun tidak secara harfiah dijelaskan dalam Alkitab, namun nilai-nilai demokrasi tetap dibahas di dalamnya. Hal itu berarti umat Kristen termasuk kaum Pentakostalisme, perlu menyadari peranan mereka dalam bersikap terhadap demokrasi politik di Indonesia. Adapun implikasinya terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia ialah kaum Pentakostalisme patut memberi dukungan kepada demokrasi politik, turut mengambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan dan terlibat aktif dalam pelayanan sosial. Dengan demikian, gereja dapat menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia dengan menciptakan kedamaian dan keadilan sosial.

Kata kunci: demokrasi; politik; pentakostalisme; Indonesia

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara berkontribusi dalam pengelolaan negara, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih untuk menyalurkan aspirasi mereka. Oleh karena itu, demokrasi sering dijelaskan sebagai sistem pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Inti dari sistem ini terletak pada adanya kesetaraan dalam hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh semua warganya. Dalam konteks ini, setiap orang memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam proses pemerintahan, termasuk dalam mengawasi, mengevaluasi, serta memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, negara ini dapat dipandang sebagai sebuah negara demokrasi terbesar yang menggunakan pemilihan langsung oleh rakyat. Namun baru-baru ini, laporan “Democracy Index 2023: Age of Conflict” yang dipublikasikan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke-56 dengan poin 6,53, mengalami penurunan dua posisi dibandingkan tahun 2022 (dengan skor 6,71). Indeks Demokrasi EIU mengevaluasi lima aspek, yaitu proses pemilihan dan keragaman, efektivitas pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan hak-hak sipil. Dengan skor ini, demokrasi Indonesia termasuk dalam kategori cacat (*flawed democracy*).¹ Situasi ini mencerminkan kemunduran, padahal demokrasi telah menjadi bagian integral dari sejarah politik Indonesia sejak kemerdekaan, dengan berbagai bentuk implementasi mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila.

Pokok persoalan yang akan penulis kaji adalah bagaimana tanggung jawab gereja yang membumi dimana kekristenan sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab perlu memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menyikapi dinamika demokrasi politik di Indonesia. Hal ini menjadi semakin relevan dalam konteks tahun 2024 yang merupakan tahun politik, di mana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Namun demikian, masih terdapat pandangan di kalangan umat Kristen yang menganggap bahwa keterlibatan dalam isu-isu demokrasi politik bukanlah bagian dari tanggung jawab gerejawi.² Padahal John Simon mengutip pernyataan Singgih yang mengatakan bahwa gereja seharusnya tidak mengisolasi diri dari perubahan politik di negara ini dan tidak seharusnya berdiri terpisah dari urusan politik.³ Kebaruan

¹ Abul Muamar, “Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia Green Network Asia - Indonesia,” *Green Network Asia - Indonesia*, August 23, 2024, <https://greennetwork.id/kabar/menurunnya-indeks-demokrasi-indonesia/>.

² Andreas A.; Ngelow Yewangoe, *Teologi Politik: Panggilan gereja di bidang politik pasca orde baru* (Makassar: Oase Intim, 2013), 86.

³ Alvary Exan Rerung and Juliati Attu, “Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale,” *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat* 4, no. 1 (June 4, 2023): 3. John Christianto Simon, “Resensi Buku: Meniadakan Atau Merangkul?”

penelitian ini terletak pada pendekatannya yang secara khusus mengkaji demokrasi politik dari sudut pandang teologi Pentakosta, yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam diskursus akademik di Indonesia.

Gerakan Pentakosta di Indonesia merupakan salah satu fenomena keagamaan yang mengalami pertumbuhan signifikan pada abad ke-20. Poltak Hutagaol dan rekan-rekannya mencatat bahwa dengan jumlah pengikut yang mencapai ratusan juta jiwa secara global, Pentakostalisme telah menjadi salah satu gerakan Kristen yang paling pesat perkembangannya di dunia. Perkembangannya tidak hanya berdampak pada kehidupan keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap dinamika agama lintas negara, memperkaya dialog ekumenis dan interaksi antaragama. Lebih dari itu, dalam berbagai konteks lokal, gerakan ini telah menjadi aktor penting dalam perdebatan sosial dan moral, turut memengaruhi kebijakan publik, termasuk dalam isu-isu seperti keadilan sosial dan hak asasi manusia. Meski demikian, keberhasilan ini juga diiringi dengan berbagai tantangan, seperti perdebatan teologis, praktik liturgis yang beragam, serta upaya integrasi dengan tradisi Kristen arus utama.⁴ Dalam hal ini, Suparta menyatakan bahwa tidak berlebihan apabila ada yang berkesimpulan bahwa gerakan Pentakosta modern pada awal kemunculannya tidak terlepas dari keterlibatan dalam dinamika politik. Namun, keterlibatan yang awalnya bersifat positif tersebut tampaknya tidak berlanjut dan kurang terpelihara dalam perkembangan selanjutnya.⁵

Perspektif Pentakostalisme selama ini cenderung menekankan aspek kesucian hidup secara personal, sehingga dalam banyak kasus gereja bersikap tertutup terhadap isu-isu politik yang dianggap sebagai wilayah yang sarat dengan intrik, manipulasi, dan ketidakmurnian moral. Sikap ini menyebabkan politik dipandang sebagai ranah “duniawi” yang tidak layak disentuh oleh komunitas yang mengutamakan kekudusan. Padahal, jika merujuk pada Kisah Para Rasul 1:8, mereka yang dipenuhi Roh Kudus justru dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara sosial, hingga ke “ujung bumi.” Bahkan dalam Kisah Para Rasul 8:4, meskipun terjadi penganiayaan dan kekacauan, jemaat mula-mula tidak mundur, melainkan menyebar dan aktif memberitakan Injil ke berbagai daerah. Realitas ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam kehidupan publik, termasuk dalam ruang demokrasi politik, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Injil. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai demokrasi politik dalam perspektif Pentakostalisme, serta implikasinya bagi partisipasi umat dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Pergulatan Teologis Protestan Dengan Islam Politik Di Indonesia,” *Gema Teologi* 37, no. 1 (April 30, 2013), accessed May 20, 2025, <https://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/163>.

⁴ John Hutagaol, Charly Nayoan, and Stefanus Kana, “Nilai-Nilai Spiritualitas Pentakosta Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Postmodern,” *LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta* 5, no. 1 (2023): 116.

⁵ Hendarto Supatra, “Mengenal Pentakostalisme Di Indonesia,” *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 3, no. 2 (November 22, 2019): 19.

Sebelumnya, telah diterbitkan sebuah tulisan yang mengulas tentang Keadilan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dari sudut pandang Pentakosta, yang ditulis oleh Andreas Sese Sunarko dalam *Harvester: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen*.⁶ Namun, penelitian tersebut kurang terperinci dalam membahas Demokrasi Politik dari perspektif Pentakostalisme, seperti yang diangkat dalam tulisan ini. Lusi Handayani juga telah mengeksplorasi tema perjalanan demokrasi dalam sistem protestan di Amerika Serikat melalui penelitiannya.⁷ Oleh karena itu, jika sudah ada penelitian yang membahas demokrasi dari perspektif sistem Protestan di Amerika Serikat, maka alangkah bijaknya apabila penelitian mengenai Demokrasi Politik dalam Perspektif Pentakostalisme juga mendapat perhatian. Karya semacam ini tentunya sangat bermanfaat bagi kaum Pentakosta dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

TEORI

Demokrasi Politik

Secara literal, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *δημοκρατία* (*dēmokratía*) yang berasal dari dua kata, *δῆμος* (*dēmos*) yang berarti “masyarakat” dan *κράτος* (*kratos*) yang berarti “kekuatan” atau “otoritas.”⁸ Jadi, demokrasi dapat dipahami sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh warga secara langsung atau oleh wakil yang dipilih oleh mereka. Definisi demokrasi yang paling umum diakui oleh publik adalah penjelasan yang diberikan oleh Abraham Lincoln, yaitu “*government of the people, by the people, for the people*”.⁹ Sedangkan untuk kata politik berakar dari istilah Yunani *polis* yang berarti “*city-state*” (negara kota). Politik menjadi fokus utama dalam semua segi kehidupan individu dalam suatu negara, meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Sering kali, politik diibaratkan sebagai inti dari kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰ Jadi, dapat disimpulkan bahwa politik adalah seni mengatur dan mengelola kehidupan warga negara atau komunitas dalam suatu negara.¹¹ Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi politik adalah jenis pemerintahan yang berfokus pada masyarakat.

⁶ Andreas Sese Sunarko, “Keadilan, Demokrasi Dan HAM Dalam Perspektif Pentakosta,” *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 4, no. 1 (June 27, 2019): 64.

⁷ Lusi Handayani, “Menapaki Demokrasi Dalam Sistem Protestan Di Amerika Serikat,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 1 (February 8, 2022): 139.

⁸ “Demokrasi,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, February 22, 2025, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Demokrasi&oldid=26950864>.

⁹ Yushak Soesilo, “Demokrasi Dalam Pandangan Kristen,” *Jurnal Antusias* 3, no. 6 (December 1, 2014): 64.

¹⁰ Jimmy Rungkat, “Teologi Politik Yesus: Sumbangsih Materi Bagi Mata Kuliah Pendidikan Agama Kristen Di Politeknik Amamapare Timika,” *Jurnal Teknik AMATA* 2, no. 2 (December 7, 2021): 22.

¹¹ Adi Putra et al., “Memahami Secara Teologis Politik Dalam Gereja,” *SAINT PAUL’S REVIEW* 3, no. 1 (June 9, 2023): 78–92, <https://doi.org/10.56194/spr.v3i1.40>.

Konsep demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan awalnya berasal dari para filsuf Yunani. Namun, penerapan nyata dari bentuk pemerintahan ini mulai terlaksana setelah terjadinya transformasi di dunia Barat pada akhir abad ke-18, misalnya melalui Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Prancis tahun 1789. Kebangkitan prinsip-prinsip demokrasi ini didorong oleh perubahan dalam aspek sosial dan budaya yang menekankan kebebasan pikiran dari berbagai jenis batasan. Tokoh-tokoh penting seperti John Locke, yang memperjuangkan hak asasi dan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat, serta Montesquieu, yang mengembangkan konsep pemisahan kekuasaan, sangat berperan dalam membentuk fondasi demokrasi modern.¹²

Dalam penggunaan masa kini, istilah demokrasi memiliki beberapa pengertian utama. Pertama, sistem pemerintahan di mana rakyat mengambil keputusan politik secara langsung, yang dikenal sebagai demokrasi langsung. Kedua, sistem pemerintahan di mana rakyat menjalankan hak mereka melalui wakil-wakil yang mereka pilih, atau yang disebut demokrasi perwakilan. Ketiga, sistem pemerintahan di mana kekuasaan mayoritas dijalankan dengan batasan-batasan konstitusional, seperti hak kebebasan berbicara dan beragama, yang disebut demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional.¹³ Dari aspek tersebut, bisa disimpulkan bahwa demokrasi memiliki arti yang sangat signifikan bagi individu-individu yang mengadopsinya, sebab melalui sistem demokrasi, hak masyarakat untuk menetapkan tujuan dan pengelolaan pemerintahan suatu negara dapat terlindungi.

Selanjutnya, Hendry B. Mayo menjelaskan konsep demokrasi dengan pernyataan berikut: *"A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom."*¹⁴ Dengan mempertimbangkan kompleksitas konsep demokrasi, sistem politik demokratis dapat diartikan sebagai sistem di mana kebijakan publik dibuat berdasarkan mayoritas suara melalui wakil-wakil yang secara efektif diawasi oleh rakyat melalui pemilihan yang rutin. Sistem ini berlandaskan prinsip kesetaraan politik dan berlangsung dalam suasana kebebasan yang dijamin. Oleh sebab itu, bisa dinyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana warga negara memainkan peran pengawasan atas kebijakan publik, berlandaskan pada prinsip keadilan, dan dijalankan dalam kondisi yang mendukung.

¹² Daya Negri Wijaya, "John Locke Dalam Demokrasi," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 8, no. 1 (November 18, 2015): 13–24, <https://doi.org/10.17977/sb.v8i1.4751>.

¹³ Yewangoe, *Teologi Politik*, 86.

¹⁴ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960), 70.

Demokrasi Dalam Alkitab

Demokrasi tidak secara eksplisit dibahas dalam Alkitab.¹⁵ Namun, apabila ditelaah lebih mendalam, prinsip-prinsip demokrasi bisa ditemukan di dalamnya. Salah satu contoh demokrasi dalam Perjanjian Lama adalah ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dalam Kitab Keluaran pasal 20, terdapat aturan-aturan yang wajib diikuti oleh setiap individu tanpa terkecuali. Raja, imam, nabi, maupun rakyat biasa tidak mendapat perlakuan istimewa dalam hal kepatuhan terhadap hukum tersebut. William Dyrness menegaskan bahwa Hukum Taurat menempatkan setiap individu setara dalam perjanjian dengan Tuhan tanpa membedakan strata sosial.¹⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip kesetaraan hak dan kewajiban, yang merupakan bagian dari demokrasi, sudah diterapkan sejak masa Hukum Taurat.

Selain itu, dalam pemerintahan para Nabi, Hakim, atau Raja, terdapat empat tugas utama yang harus dijalankan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. *Pertama*, memberikan kebebasan dari penjajahan dan menjamin keamanan bagi seluruh warga. *Kedua*, mengupayakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari meskipun perhatian utama sering diberikan kepada lingkungan istana, seperti yang terlihat pada kisah Yusuf di istana Firaun. *Ketiga*, mendukung masyarakat dalam menjaga hubungan dengan Allah sebagai pencipta, contohnya seperti yang terjadi pada bangsa Niniwe. *Keempat*, Hakim atau Raja memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan kesetiaan warga terhadap negara serta pemerintah yang memerintah.¹⁷

Dalam Perjanjian Baru, demokrasi memang tidak dibahas secara langsung, tetapi prinsip-prinsip dasarnya dapat ditemukan dalam ajaran Yesus. Diketahui bahwa dalam negara yang menganut sistem demokrasi, persamaan hak dan kewajiban setiap warga sangat dijunjung tinggi. Semua warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, dan tidak hanya itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Dalam Lukas 20:20-26, Yesus menghadapi pertanyaan dari para ahli Taurat dan imam mengenai kewajiban membayar pajak. Dalam percakapan itu, Yesus menegaskan bahwa segala sesuatu yang wajib diberikan kepada Kaisar harus diserahkan kepada Kaisar, dan apa yang menjadi hak Allah harus diberikan kepada Allah (ay. 25). Pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib, umumnya dalam bentuk uang yang perlu dibayarkan oleh masyarakat kepada negara atau pemerintah, berkaitan dengan penghasilan, kepemilikan, biaya

¹⁵ Rut Debora Butarbutar, Raharja Milala, and Jeimme Ulin Tarigan, "Dari Demokrasi Ke Undi: Tinjauan Teologis Tentang Undi Dalam Alkitab Serta Relevansinya Bagi Pemilihan Pemimpin Gereja," *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 6, no. 2 (December 31, 2020), <https://e-journal.iaknambon.ac.id/index.php/KNS/article/view/180>.

¹⁶ William Dyrness, *Tema-tema Dalam Teologi Perjanjian Lama* (Makassar: Gandum Mas, 2004), 113.

¹⁷ Hasahatan Hutahaean, "Teologi Politik Gereja; Menemukan dan Memancarkan Tritugas Gereja dalam Pilkada dan Pilpres: Indonesia," *Melo: Jurnal Studi Agama-agama* 1, no. 1 (June 23, 2021): 1–17, <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v1i1.1>.

pembelian barang, dan lain-lain.¹⁸ Oleh sebab itu, pajak memiliki fungsi krusial dalam kelancaran administrasi negara demokrasi. Dari sini dapat dipahami bahwa Yesus juga menekankan pentingnya keadilan baik kepada Allah maupun kepada pemerintah, karena sesungguhnya pemerintah bertindak sebagai perwakilan Allah di dunia ini.

Pernyataan ini diambil oleh Rasul Paulus yang menyatakan bahwa setiap orang harus tunduk kepada pemerintah karena pemerintah adalah alat Allah untuk menghukum mereka yang berbuat jahat. Oleh karena itu, Paulus menegaskan kembali pentingnya membayar pajak, sebab pemerintah menjalankan tugas sebagai pelayan Allah (Roma 13:1-7). Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa Alkitab tidak menentang demokrasi, mengingat terdapat prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung di dalamnya.

Demokrasi Di Indonesia

Pembahasan mengenai demokrasi di Indonesia bukanlah hal yang sederhana. Menjelang peringatan 74 tahun kemerdekaan pada tahun ini, Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi. Setidaknya terdapat empat aspek perkembangan demokrasi yang dapat diidentifikasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar.¹⁹

Tabel.1 Tahapan Evolusi Sistem Demokrasi di Indonesia (1945–1998)

Periode	Sistem Demokrasi yang Diterapkan	Keterangan
18 Agustus 1945-14 November 1945	Demokrasi Konstitusional	Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
14 November 1945-5 Juli 1959	Demokrasi Liberal	Ditandai dengan sistem parlementer dan pergantian kabinet
5 Juli 1959-21 Maret 1968	Demokrasi Terpimpin	Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959
21 Maret 1968-1998	Demokrasi Pancasila	Diterapkan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto

Berdasarkan keempat perkembangan demokrasi yang telah diuraikan, demokrasi Pancasila dianggap sebagai model demokrasi yang paling rasional dan memiliki karakteristik yang spesifik. Dalam kajiannya, Eddy menyimpulkan bahwa demokrasi Pancasila sangat menekankan pada hikmat kebijaksanaan (akal sehat). Filsafat yang menjadi landasannya terbilang logis dan realistis karena melihat manusia sebagai individu yang berpikir. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila memiliki tingkat rasional dan keunikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Demokrasi Liberal atau Demokrasi Rakyat (Demokrasi Komunis).²⁰

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, s.v. "pajak," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak>.

¹⁹ Cora Elly Noviyati, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 336.

²⁰ Roch Eddy Prabowo, "Demokrasi Pancasila Sebagai Model Demokrasi Yang Rasional Dan Spesifik," *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 1, no. 1 (2011): 48, <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/574>.

Demokrasi Pancasila muncul sebagai hasil dari reaksi terhadap “Demokrasi Terpimpin” yang diterapkan selama masa kepemimpinan Soekarno. Ini dapat dipahami sebagai usaha untuk mengembalikan prinsip-prinsip hukum yang mengutamakan adanya kepastian hukum bagi seluruh warga negara, di mana hak asasi manusia dilindungi baik secara kelompok maupun individu, dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindari melalui struktur kelembagaan. Dalam hal ini, perlu ada usaha untuk merelakan lembaga-lembaga dan tata kelola pada era Orde Baru dari keterikatan-keterikatan pribadi dan lebih fokus pada aspek institusionalisasi (depersonalization dan institutionalization).²¹

Selain itu, dalam kajiannya, Banjo menyatakan bahwa Era Reformasi telah mendorong pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila sebagai bagian dari transformasi politik Indonesia yang lebih matang. Ia menegaskan bahwa Demokrasi Pancasila tidak hanya diperlukan sebagai sebuah ideologi, melainkan juga sebagai pandangan hidup yang melekat dalam kultur kebangsaan.²² Oleh karena itu, Demokrasi Pancasila sangat relevan dan tepat untuk diadopsi di Indonesia guna mengakomodasi keragaman budaya yang ada di negara ini. Sistem demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dianggap tepat untuk diimplementasikan dalam konteks Indonesia karena proses demokrasi perlu didasari oleh nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai terkait Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Sejarah Pentakostalisme

Dari berbagai aliran yang ada, Pentakostalisme merupakan salah satu gerakan keagamaan yang mengalami pertumbuhan pesat pada abad ke-20. Bahkan, beberapa pihak menyamakan gerakan ini dengan gerakan Reformasi.²³ Pernyataan ini juga didukung oleh Siregar dan rekan-rekannya yang menyebutkan bahwa Pentakostalisme adalah sebuah gerakan yang sangat hidup dan terlihat sehingga menjadi topik penting untuk dibahas dalam komunitas teolog.²⁴ Sebagai akibatnya, sangat krusial untuk melakukan analisis yang lebih mendetail agar dapat memahami inti dari gerakan Pentakostalisme ini.

Istilah Pentakosta awalnya muncul dalam Kisah Para Rasul pasal 2, yang mengacu pada kejadian di mana lidah-lidah api turun dan menaungi semua anggota jemaat sebagai tanda bahwa Roh Kudus telah dikaruniakan. Salah satu

²¹ Seminar Angkatan Darat II, Garis-Garis Besar Kebijaksanaan dan Rencana Pelaksanaan Stabilisasi Politik. Seskoad Bandung, 1966, dalam Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, Jakarta, 1981), 74.

²² Elson Banjo, “Gereja (Agama) dan Politik,” *Jurnal Uniera* 2, no. 2 (2013): 72.

²³ Steven H. Talumewo, *Sejarah Gerakan Pentakosta* (Yogyakarta: Yayasan Andi, 1988), 2.

²⁴ Viktor Deni Siregar, Jabes Pasaribu, and Foera-era Ndruru, “Spiritualitas Pentakosta Dalam Menghadapi Tantangan di Era Post Truth,” *LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta* 4, no. 1 (2022): 142, <https://doi.org/10.37731/log.v4i1.98>.

manifestasi dari kepenuhan Roh Kudus tersebut adalah kemampuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain, yang diberikan secara khusus oleh Roh Kudus itu sendiri.

Sebenarnya, Hari Raya Pentakosta merupakan suatu momentum yang secara signifikan mencerminkan identitas Yahudi, baik dari aspek umat maupun bangsa. Perayaan hari raya Yahudi, termasuk Pentakosta, tidak dapat dipisahkan dari konteks kehidupan politik bangsa Israel. Oleh karena itu, dalam penelitiannya, Harls Siahaan menyatakan bahwa pemanfaatan momentum Pentakosta dengan penekanan pada sentralitas Bait Allah mengandung dimensi politis yang disampaikan oleh Lukas kepada para pembacanya.²⁵

Secara historis, gerakan Pentakosta merupakan kelanjutan dari gerakan Kesucian (Holiness Movement) yang berakar pada ajaran John Wesley, pendiri gereja-gereja Metodis di Amerika Serikat. Terdapat dua pendekatan utama dalam memahami sejarah kelahiran gerakan ini, yaitu *idealistic approach* (pendekatan sejarah berdasarkan idealisme) dan *realistic approach* (pendekatan sejarah berdasarkan realitas empiris).²⁶ Berikut ini penjelasannya.

Idealistic Approach²⁷

Pendekatan yang bersifat idealistik dalam analisis sejarah gerakan Pentakosta mengacu pada kejadian-kejadian yang berlangsung di Topeka, Kansas, di Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Charles Fox Parham yang hidup antara tahun 1873 hingga 1929. Parham pada awalnya menjabat sebagai pendeta di Gereja Episcopal Metodis. Selanjutnya, ia memperoleh pengaruh dari sejumlah ajaran dan tokoh, antara lain doktrin *second blessing*, serta figur seperti John Alexander Dowie dan B. H. Irwin yang mengajarkan pentingnya baptisan dengan Roh dan api sebagai *third blessing*. Pengaruh kedua tokoh tersebut sangat signifikan terhadap pribadi dan pelayanan Parham. Berdasarkan pemahaman ini, Parham mendirikan Wisma Penyembuhan Ilahi (Bethel) dan melakukan perjalanan pelayanan kesembuhan di berbagai kota di Amerika Serikat.

Parham mengajarkan bahwa baptisan Roh Kudus akan diiringi dengan fenomena *glossolalia* atau berbicara dalam bahasa lidah. Sebagai langkah selanjutnya, mereka melakukan praktik tersebut dengan berdoa sepanjang malam menunggu pengalaman bahasa Roh pada tanggal 31 Desember 1900. Pada 1 Januari 1901, tercatat bahwa seorang perempuan bernama Agnes N. Ozman meminta penumpangan tangan agar dapat menerima baptisan Roh Kudus. Peristiwa tersebut dilaporkan berhasil, dan Agnes kemudian

²⁵ Harls Evan R. Siahaan, "Memaknai Pentakostalisme dalam Maksud Politis Lukas: Analisis Kisah Para Rasul 1:6-8," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 1 (November 30, 2018): 39, <https://doi.org/10.30648/dun.v3i1.178>.

²⁶ Jan S. Arintonang, *Berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja* (BPK Gunung Mulia, 1995), 167.

²⁷ Daniel; Ronda, *Sistem Berteologi ; Seluk Beluk Pengajaran Kristen* (Matana Bina Utama, 2015), 104-105.

dikabarkan mampu berbicara dalam bahasa Mandarin untuk pertama kalinya, disertai dengan munculnya lingkaran cahaya di wajah dan kepalanya. Peristiwa ini kemudian dipandang sebagai momen kelahiran gerakan Pentakosta.

Realistic Approach²⁸

Pendekatan realistik (*realistic approach*) mengenai munculnya gerakan Pentakosta dipelopori oleh William Seymour ketika memimpin Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di sebuah gereja Baptis di Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam pelayanannya, Seymour menghadapi penolakan dari sebagian pendengar akibat pengajaran yang disampaikannya mengenai baptisan Roh Kudus. Namun demikian, terdapat pula sejumlah jemaat yang menunjukkan minat dan keinginan untuk terus mendengarkan pengajarannya. Oleh karena itu, diputuskan untuk memindahkan kegiatan tersebut ke rumah salah seorang anggota jemaat guna melanjutkan pelayanan tersebut.

Peristiwa tersebut menandai terjadinya baptisan Roh Kudus di kalangan jemaat, yang disertai dengan manifestasi berbicara dalam bahasa roh (*glossolalia*), yang secara historis terjadi pada tanggal 9 April 1906. Setelah insiden tersebut, pengajaran William Seymour mulai menarik banyak pengikut. Mereka lalu menyewa sebuah bangunan bekas tempat ibadah di Azusa Street yang menjadi pusat kegiatan kebangkitan rohani secara teratur. Namun, dalam salah satu Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR), timbul perselisihan akibat infiltrasi dari kelompok spiritualis yang dikategorikan sebagai sekte kultik. Untuk meredakan ketegangan tersebut, Seymour mengundang Charles Fox Parham, gurunya, guna memberikan arahan dan penertiban. Akan tetapi, Parham justru mengkritik jalannya kegiatan tersebut sehingga ia diusir oleh para pemimpin gereja tersebut. Akibatnya, hubungan antara Seymour dan Parham mengalami perpecahan yang mendalam.

Teologi Pentakostalisme

Setiap aliran memiliki doktrin teologis yang menjadi keyakinannya, demikian pula dengan gerakan Pentakostalisme yang memiliki teologi khas sebagai identitasnya. Berikut ini adalah teologi Pentakostalisme yang dikenal sebagai Injil Empat Serangkai, yang dianut oleh salah satu denominasi terbesar gerakan Pentakosta di Amerika, yaitu *The International Church of the Four Square Gospel*.²⁹ *Pertama*, Yesus Kristus adalah Almasih dan Juruselamat. Hal itu berarti bahwa setiap orang perlu mengalami pertobatan dan kembali kepada-Nya. *Kedua*, Yesus Kristus adalah Ahli-obat bagi segala penyakit dan cacat. Hal ini merujuk pada doa, peletakan tangan atau penggosokan dengan minyak (Yak. 5:14-15) yang akan membawa kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. *Ketiga*,

²⁸ Ibid., 105-106.

²⁹ Muller Kruger. "Gerakan-gerakan Pentakosta" dalam *Geredja, Sekte dan Aliran-aliran Modern* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1954), 30.

Yesus Kristus ingin membaptiskan setiap orang dengan Roh Kudus. Setiap orang yang sudah percaya harus mengharapkan dengan yakin untuk memperoleh baprisanan roh yang memberikan kuasa berupa perkataan-perkataan dan nubuat-nubuat dalam pelayanan. Dan *keempat*, Yesus Kristus adalah Raja yang segera akan kembali. Maksudnya ialah Yesus Kristus akan menjemput mempelainya pada masa Kerajaan 1000 Tahun dengan pemindahan terlebih dahulu dari jemaat kepada pengantin.

Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa Pentakostalisme memiliki karakteristik unik berupa penekanan pada pemberian karunia dan kuasa Roh Kudus, sesuai dengan janji Yesus sebelum kenaikan-Nya ke surga. Gerakan ini meyakini bahwa baprisanan Roh Kudus merupakan unsur esensial dalam Kekristenan, yang memungkinkan individu untuk mengalami manifestasi kuasa dan mujizat ilahi secara langsung. Oleh karena itu, Pentakostalisme menempatkan prioritas tinggi pada kehidupan yang suci serta pentingnya pengalaman spiritual pribadi dalam berinteraksi dengan Tuhan.

METODE

Untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui tinjauan literatur.³⁰ Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan artikel dari media cetak maupun daring yang berhubungan dengan topik demokrasi politik dalam perspektif Pentakostalisme serta dampaknya terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Metode kualitatif ini dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena sosial serta budaya yang sedang diteliti. Dengan demikian, studi ini mengkaji konsep demokrasi politik, demokrasi dalam kerangka Alkitab, perkembangan demokrasi di Indonesia, dan juga sejarah serta teologi Pentakostalisme. Melalui penguraian tersebut, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi komunitas Pentakostalisme dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia secara efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melihat berbagai pandangan dan penjelasan mengenai demokrasi dan kaum Pentakostalisme, maka perlu dilakukan tinjauan terhadap implikasinya terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia pada saat ini. Sebab jika menelaah mengenai kehidupan kekristenan di Indonesia, seharusnya kaum Pentakostalisme juga turut mengambil bagian dalam demokrasi politik sebab Alkitab pun menyinggung mengenai hal tersebut. Itu sebabnya dalam bagian ini penulis akan menguraikan tiga implikasi demokrasi politik dalam

³⁰ Rodrigo Ramalho et al., "Literature Review and Constructivist Grounded Theory Methodology," *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research* 16, no. 3 (August 17, 2015), <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/2313>.

perspektif Pentakostalisme dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Berikut penjelasannya.

Memberi Dukungan kepada Demokrasi Politik

Seringkali demokrasi politik dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibahas dalam kehidupan kekristenan. Politik dianggap urusan duniawi yang tidak perlu dibahas oleh gereja sebab gereja memusatkan perhatiannya kepada hal-hal surgawi. Terlebih lagi kepada kaum Pentakosta yang sangat menekankan betapa pentingnya kesucian hidup. Pentakostalisme seakan menutup mata dengan hal-hal yang berbau demokrasi politik padahal setiap orang percaya diutus untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Roh Kudus berjanji untuk menyertai setiap orang percaya dengan memberikan karunia roh agar dapat menjadi berkat dalam dunia ini.

Itulah sebabnya, kaum Pentakostalisme perlu memberikan dukungan kepada demokrasi politik sebab mereka termasuk mengambil bagian di dalamnya (sebagai rakyat). Dalam sebuah pengumuman yang dirilis oleh Dewan Gereja Sedunia atau *World Council of Churches* (WCC) pada tahun 1948, terdapat landasan teologis untuk mendukung demokrasi.

Manusia diciptakan dan ditugaskan sebagai individu yang merdeka, dengan tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Setiap kecenderungan dalam negara dan masyarakat yang menghalangi kemampuan manusia untuk bertindak secara bertanggung jawab merupakan penolakan terhadap tujuan Tuhan untuk manusia dan karya-Nya dalam hal keselamatan. Sebuah masyarakat yang bertanggung jawab adalah masyarakat di mana kebebasan adalah kebebasan yang diakui oleh individu yang menjaga tanggung jawab terhadap keadilan dan ketertiban publik, serta di mana mereka yang memiliki kekuasaan politik atau ekonomi bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada Tuhan dan kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh keputusan mereka.³¹

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat diketahui bahwa inilah dukungan gereja terhadap demokrasi politik. Walaupun kata demokrasi tidak disinggung di dalamnya, namun nilai demokrasi secara gamblang dapat ditemukan. Oleh sebab itu, sebagai anggota tubuh Kristus, kaum Pentakostal perlu memberikan dukungannya terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Salah satu contoh yang dapat dilakukan ialah dengan aktif terlibat dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum.

Mengambil Bagian dalam Kegiatan Kemasyarakatan

Selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan oleh kaum Pentakostalisme adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Sebagai individu yang menghargai Pancasila, sebaiknya anggota Pentakostalisme menerapkan prinsip-prinsip

³¹ Yewangoe, *Teologi Politik*, 113. Yewangoe mengutip WCC, *The Church and Disorder of Society* (New York: Harper & Brothers, 1948), 192.

Kerakyatan. Salah satu metode untuk melakukannya adalah dengan terus memelihara serta memajukan semangat musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam perwakilan. Bagaimana mungkin seseorang dapat bermusyawarah tanpa terlibat dalam aktivitas masyarakat.

Karena itu, di dalam buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dijelaskan bahwa “cita permusyawaratan memancarkan kehendak mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya ‘kesederhanaan/persamaan dalam perbedaan’.”³² Untuk itu, mengambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan merupakan salah satu cara menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dari berbagai kompleksnya keberagaman budaya bangsa Indonesia. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil ialah terlibat dalam aksi gotong royong.

Memulai dari hal-hal yang sederhana tentunya akan berpengaruh pada isu yang lebih signifikan. Tak menutup kemungkinan, melalui kegiatan tersebut orang percaya dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Inilah yang dimaksudkan dengan garam dan terang dunia yaitu ketika gereja dapat terlibat dalam lingkungan sekitarnya untuk menggarami dan menerangi dunia. Sudah saatnya gereja termasuk kaum Pentakostalisme untuk berbaur dengan rakyat sehingga dapat menjadi berkat.

Terlibat Aktif dalam Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah sebuah pelayanan di mana gereja Tuhan terlibat secara aktif untuk melayani dan bersaksi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentunya ditunjukkan melalui tindakan kasih yang nyata bukan hanya sebagai pemanis bibir saja. Sebab pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang juga dilakukan oleh Yesus saat datang ke dunia ini. Matius 9:26 berbunyi: “Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.” Pandangan ini sejajar dengan tulisan John Stott berikut ini.

Kasih terhadap orang lain harus ditunjukkan melalui kepedulian menyeluruh terhadap seluruh aspek kebutuhannya, baik fisik, mental, maupun sosial. Inilah alasan mengapa pelayanan Yesus selalu diungkapkan dengan dua kata yang terpisah, yaitu perkataan dan tindakan. Penyebaran Injil serta tanggung jawab sosial ibarat dua sayap pada burung atau dua sisi dari gunting, yang tidak dapat bekerja secara efektif jika hanya memiliki satu.³³

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu tindakan nyata yang dapat diambil oleh gereja, termasuk kaum Pentakostalisme, dalam pengamalan demokrasi di Indonesia adalah

³² Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), 69.

³³ John Stott, *Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani* (Jakarta: Yayasan Bina Kasih, 2012), 92.

memberikan pengaruh positif bagi dunia. Oleh karena itu, Robinson menyatakan bahwa ketika gereja setempat berinteraksi dengan Kristus dan merasakan kehadiran-Nya, akan timbul rasa empati, perhatian, dan dorongan untuk melayani dalam anggotanya. Rasa kepedulian ini akan mendorong munculnya kegiatan layanan di sektor pendidikan, sosial, kesehatan, dan bidang lainnya, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi).³⁴

Selanjutnya, dalam studi yang dilaksanakan oleh Dina Latumahina, dia menyoroti bahwa lingkungan di mana gereja beroperasi tengah menghadapi krisis yang kompleks. Setiap tahun, jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan semakin meningkat di berbagai belahan dunia.³⁵ Maka dari itu, gereja harus turut berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan di lingkungan sekitarnya. Norman E. Thomas mengutip pandangan Dietrich Bonhoeffer pada 1944 bahwa "*The Church is the church only when it exist for others*" (Gereja adalah gereja hanya ketika ia hidup untuk orang lain).³⁶ Dengan kata lain, gereja harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana ia dibuang (Yeremia 29:7).

KESIMPULAN

Berdasarkan pokok kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan, sekaligus penanggung jawab terhadap keberlangsungan keadilan dalam negara. Meskipun nilai-nilai demokrasi tidak dijabarkan secara eksplisit dalam Alkitab, prinsip-prinsipnya tetap tersirat, terutama dalam mandat untuk menjadi saksi Kristus di segala bidang kehidupan (Kis. 1:8). Demikian juga dengan dengan kaum Pentakostalisme perlu meninggalkan kecenderungan untuk mengisolasi diri dan mulai terlibat aktif dalam ruang sosial-politik sebagai bagian dari panggilan iman. Gereja dipanggil untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial melalui pelayanan diakonia, kunjungan ke lembaga pemasyarakatan dan pemberdayaan jemaat sebagai wujud nyata kehadiran Kristus dan misi Kerajaan Allah yang menghendaki keadilan, kedamaian dan pembebasan dari ketidakadilan. Dengan demikian maka gereja secara khusus kaum Pentakostal harus tampil sebagai agen transformasi sosial demi terciptanya kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah.

REFERENSI

- Aritonang, Jan S. *Berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja*. BPK Gunung Mulia, 1995.
- Banjo, Elson. "Gereja (Agama) dan Politik." *Jurnal Uniera* 2, no. 2 (2013): 67-79.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 1981.

³⁴ Darrell W. Robinson, *Total Church Life* (Bandung: Lembaga Literatur Baptis. 2004), 31.

³⁵ Dina Elisabeth Latumahina, "Kemesiasan Yesus Berdasarkan Lukas 4:18-19 Sebagai Dasar Holistic Ministry Gereja," *Missio Ecclesiae* 2, no. 2 (October 31, 2013): 111-24, <https://doi.org/10.52157/me.v2i2.28>.

³⁶ Norman E. Thomas, *Teks-Teks Klasik-Norman E. Thomas: tentang Misi dan Kekristenan Sedunia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 124.

- Butarbutar, Rut Debora, Raharja Milala, and Jeimme Ulin Tarigan. "Dari Demokrasi Ke Undi: Tinjauan Teologis Tentang Undi Dalam Alkitab Serta Relevansinya Bagi Pemilihan Pemimpin Gereja." *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 6, no. 2 (December 31, 2020): 162-179. <https://e-journal.iaknambon.ac.id/index.php/KNS/article/view/180>.
- Dyrness, William. *Tema-tema Dalam Teologi Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas, 2004.
- Erari, Karl Ph. *Supaya Engkau Membuka Belenggu Kemiskinan*. Jakarta: Gunung Mulia, 1999.
- Handayani, Lusi. "Menapaki Demokrasi Dalam Sistem Protestan Di Amerika Serikat." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 1 (February 8, 2022): 139-144.
- Hutagaol, John, Charly Nayoan, and Stefanus Kana. "Nilai-Nilai Spiritualitas Pentakosta Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Postmodern." *LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta* 5, no. 1 (2023): 115-143.
- Hutahaean, Hasahatan. "Teologi Politik Gereja; Menemukan dan Memancarkan Tritugas Gereja dalam Pilkada dan Pilpres: Indonesia." *Melo: Jurnal Studi Agama-agama* 1, no. 1 (June 23, 2021): 1-17.
- Kruger, Muller. *Gerakan-gerakan Pentakosta. Dalam Geredja, Sekte dan Aliran-aliran Modern*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1954.
- Latumahina, Dina Elisabeth. "Kemesiasan Yesus Berdasarkan Lukas 4:18-19 Sebagai Dasar Holistic Ministry Gereja." *Jurnal Institut Injili Indonesia* 4, no. 4 (2013): 111-124.
- Mayo, H. B. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press, 1960.
- Muamar, Abul. "Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia Green Network Asia - Indonesia." *Green Network Asia - Indonesia*, August 23, 2024. <https://greennetwork.id/kabar/menurunnya-indeks-demokrasi-indonesia/>.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 333-354.
- Paimoen, Eddy. *Kerajaan Allah dan Gereja*. Bandung: Penerbit Agiamedia, 1999.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.
- Prabowo, Roch Eddy. "Demokrasi Pancasila Seagai Model Demokrasi Yang Rasional Dan Spesifik." *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 1, no. 1 (2011). <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/574>.
- Putra, Adi, Charisal B. S. Manu, Gunar Sahari, and Filmon Berek. "Memahami Secara Teologis Politik Dalam Gereja." *Saint Paul's Review* 3, no. 1 (June 9, 2023): 78-92.
- Ramalho, Rodrigo, Peter Adams, Peter Huggard, and Karen Hoare. "Literature Review and Constructivist Grounded Theory Methodology." *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research* 16, no. 3

- (August 17, 2015). <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/2313>.
- Rerung, Alvary Exan, and Juliati Attu. "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale." *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat* 4, no. 1 (June 4, 2023): 1–17.
- Robinson, Darrell W. *Total Church Life*. Bandung: Lembaga Literatur Baptis, 2004.
- Ronda, Daniel. *Sistem Berteologi; Seluk Beluk Pengajaran Kristen*. Tangerang: Matana Bina Utama, 2015.
- Rungkat, Jimmy. "Teologi Politik Yesus: Sumbangsih Materi Bagi Mata Kuliah Pendidikan Agama Kristen Di Politeknik Amamapare Timika." *Jurnal Teknik AMATA* 2, no. 2 (December 7, 2021): 22–32.
- Siahaan, Harls Evan R. "Memaknai Pentakostalisme dalam Maksud Politis Lukas: Analisis Kisah Para Rasul 1:6-8." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 1 (November 30, 2018): 37–51.
- Simon, John Christianto. "Resensi Buku: Meniadakan Atau Merangkul? Pergulatan Teologis Protestan Dengan Islam Politik Di Indonesia." *Gema Teologi* 37, no. 1 (April 30, 2013). <https://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/163>.
- Siregar, Viktor Deni, Jabes Pasaribu, and Foera-era Ndruru. "Spiritualitas Pentakosta Dalam Menghadapi Tantangan di Era Post Truth." *LOGIA: Jurnal Teologi Pentakosta* 4, no. 1 (2022): 141–153.
- Soesilo, Yushak. "Demokrasi Dalam Pandangan Kristen." *Jurnal Antusias* 3, no. 6 (December 1, 2014): 62–72.
- Stott, John. *Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani*. Jakarta: Yayasan Bina Kasih, 2012.
- Sunarko, Andreas Sese. "Keadilan, Demokrasi Dan HAM Dalam Perspektif Pentakosta." *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 4, no. 1 (June 27, 2019): 64–73.
- Supatra, Hendarto. "Mengenal Pentakostalisme Di Indonesia." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 3, no. 2 (November 22, 2019): 11–24.
- Talumewo, S. H. *Sejarah Gerakan Pentakosta*. Yogyakarta: Yayasan Andi, 1988.
- Thomas, Norman E. *Teks-teks Klasik tentang Misi dan Kekristenan Sedunia*. Jakarta: Gunung Mulia, 2001.
- Wijaya, Daya Negri. "John Locke Dalam Demokrasi." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 8, no. 1 (November 18, 2015): 13–24.
- Yewangoe, Andreas A., Zakaria Ngelow. *Teologi Politik: Panggilan gereja di bidang politik pasca orde baru*. Oase Intim, 2013. Accessed May 20, 2025. [//library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=25553](http://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=25553).
- "Demokrasi." *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, February 22, 2025. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Demokrasi&oldid=26950864>.